

Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam Mitigasi Perubahan Iklim di *Gampong Uteunkot Kota Lhokseumawe*

Dinda Puspita Sari Hsb¹, Ferizaldi², Nazaruddin³, Aiyub⁴, Mauludi⁵, Risna Dewi⁶
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: dindaaphsb07@gmail.com

Diterima: 02-08-2026 | Disetujui: 07-08-2026 | Diterbitkan: 09-08-2026

ABSTRACT

The Climate Village Program (Program Kampung Iklim or ProKlim) is a government policy that encourages community participation in climate change adaptation and mitigation at the local level. This study aims to analyze the implementation of ProKlim in Gampong Uteunkot, Lhokseumawe City, and identify the factors hindering its implementation. This study employed a descriptive qualitative approach using the policy implementation model of Van Meter and Van Horn as the analytical framework. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the Lhokseumawe Environmental Agency, the village government, the Dara Manis Farmers Group, and local communities. The findings indicate that ProKlim has been implemented through adaptation activities, including food security enhancement by utilizing home yards and village gardens, disaster evacuation route signage, flood control, and disease prevention. Mitigation efforts were carried out through the conversion of organic waste into compost. Program sustainability was supported by the Dara Manis Farmers Group and collaboration among the village government, the Environmental Agency, academics, and non-governmental organizations (NGOs). However, the implementation has not been optimal due to limited financial and human resources, changes in village leadership, inadequate coordination and monitoring, and vulnerable socio-economic and flood-prone environmental conditions. The study concludes that strengthening institutional capacity, resources, coordination, and continuous community assistance is essential to ensure the sustainability of the program.

Keywords: *Climate Village Program; Policy Implementation; Climate Change Mitigation; Environmental Policy; Community Participation.*

ABSTRAK

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ProKlim di *Gampong Uteunkot*, Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, pemerintah *Gampong*, Kelompok Tani Dara Manis, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ProKlim dilaksanakan melalui kegiatan adaptasi berupa ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan kebun desa, pembuatan plang jalur evakuasi bencana, pengendalian banjir, dan pengendalian penyakit. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Keberlanjutan program

didukung oleh Kelompok Tani Dara Manis serta kolaborasi pemerintah *Gampong*, Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, dan LSM. Implementasi ProKlim belum optimal karena terkendala keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, transisi pemerintahan *Gampong*, koordinasi dan monitoring yang belum berkelanjutan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang rawan banjir. Penelitian menyimpulkan bahwa keberlanjutan ProKlim memerlukan penguatan kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan pendampingan masyarakat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Program Kampung Iklim; Mitigasi Perubahan Iklim; Kebijakan Lingkungan; Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan. Peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya intensitas kejadian cuaca ekstrem telah memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampak tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal.

Salah satu kebijakan yang dikembangkan pemerintah adalah Program Kampung Iklim (ProKlim), yaitu program nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi secara berkelanjutan. Program ini mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan sesuai dengan potensi dan kerentanan wilayah, seperti penguatan ketahanan pangan, pengendalian banjir, pengendalian penyakit terkait perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Pelaksanaan ProKlim diharapkan mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui partisipasi masyarakat.

Di Kota Lhokseumawe, *Gampong* Uteunkot merupakan salah satu *Gampong* yang telah memperoleh penghargaan Program Kampung Iklim kategori Pratama. Penghargaan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah *Gampong* bersama masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian perubahan iklim. Namun demikian, capaian penghargaan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas implementasi program di lapangan. Berdasarkan kondisi empiris, *Gampong* Uteunkot masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti banjir pada kawasan permukiman saat curah hujan tinggi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, koordinasi serta monitoring yang belum berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ProKlim. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan program di tingkat lokal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Kampung Iklim dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan. Mangiri (2023) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mandasari dkk. (2025) menjelaskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan berperan dalam memperkuat tata kelola lingkungan untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. Mandala dkk. (2025) menemukan bahwa inovasi program, kelembagaan yang kuat, dan keterlibatan masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan implementasi ProKlim. Susanti dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa ProKlim mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada keberhasilan program, pemberdayaan masyarakat, atau aspek kolaboratif. Penelitian yang menganalisis implementasi Program Kampung Iklim menggunakan perspektif implementasi kebijakan, khususnya model Van Meter dan Van Horn, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian mengenai implementasi ProKlim pada tingkat *Gampong* dengan mengaitkan

kegiatan adaptasi, mitigasi, aspek pendukung keberlanjutan, dan faktor penghambat implementasi masih belum banyak dilakukan, khususnya di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui penggunaan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis implementasi Program Kampung Iklim berdasarkan enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan ProKlim, tetapi juga menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan pada tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam mitigasi perubahan iklim di *Gampong* Uteunkot, Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan lingkungan dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Kampung Iklim di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam mitigasi perubahan iklim di *Gampong* Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus yang memiliki batasan yang jelas (*bounded system*), sehingga memungkinkan peneliti mengkaji implementasi kebijakan secara komprehensif sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja karena *Gampong* Uteunkot merupakan salah satu *Gampong* penerima penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) kategori Pratama, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk menganalisis implementasi program sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi pada tingkat lokal.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental/snowball sampling*. Informan terdiri atas unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, pemerintah *Gampong*, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, kader *Gampong*, serta masyarakat yang terlibat maupun mengetahui pelaksanaan Program Kampung Iklim. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi ProKlim sehingga informasi yang diperoleh mampu menjelaskan fenomena penelitian secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan ProKlim dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Observasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan, kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan ProKlim. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan berbagai dokumen seperti peraturan, dokumen perencanaan *Gampong*, laporan kegiatan, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data mengacu pada Merriam dan Tisdell (2016) yang dilakukan secara induktif dan komparatif sejak proses pengumpulan data. Tahapan analisis meliputi pengorganisasian data, pemberian kode, pembentukan kategori melalui perbandingan konstan, pengembangan tema, interpretasi data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan temuan yang kredibel mengenai implementasi Program Kampung Iklim di *Gampong Uteunkot*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong Uteunkot* Kota Lhokseumawe

Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong Uteunkot* merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi dan mitigasi yang dilaksanakan secara partisipatif. Pelaksanaan program melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Pemerintah *Gampong Uteunkot*, Kelompok Tani Dara Manis, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ProKlim di *Gampong Uteunkot* diwujudkan melalui kegiatan adaptasi, mitigasi, dan aspek pendukung keberlanjutan program. Di antara berbagai kegiatan tersebut, implementasi yang paling menonjol terdapat pada aspek adaptasi melalui penguatan ketahanan pangan yang dikelola oleh Kelompok Tani Dara Manis. Kelompok ini berperan aktif dalam memanfaatkan pekarangan rumah dan kebun desa untuk mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Selain kegiatan ketahanan pangan, implementasi adaptasi juga dilakukan melalui pembuatan plang jalur evakuasi bencana, pengendalian banjir, dan pengendalian penyakit.

Pada aspek mitigasi, implementasi ProKlim diwujudkan melalui pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Kegiatan tersebut bertujuan mengurangi timbulan sampah organik sekaligus menghasilkan pupuk yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian dan pemanfaatan pekarangan. Sementara itu, keberlanjutan program didukung oleh peran Kelompok Tani Dara Manis serta kolaborasi antara Pemerintah *Gampong Uteunkot*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, akademisi, dan LSM yang berperan sebagai pembina, pendamping, serta pemberi materi dalam pelaksanaan ProKlim.

Secara umum, implementasi ProKlim telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, terutama melalui kegiatan ketahanan pangan yang menjadi program unggulan di *Gampong Uteunkot*. Namun demikian, keberlanjutan pelaksanaan program masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, perubahan kepemimpinan *Gampong*, serta belum optimalnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ProKlim tidak hanya diukur dari penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mempertahankan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, implementasi Program Kampung Iklim di *Gampong Uteunkot* selanjutnya dianalisis berdasarkan tiga kelompok kegiatan utama, yaitu implementasi

kegiatan adaptasi perubahan iklim, implementasi kegiatan mitigasi perubahan iklim, dan implementasi aspek pendukung keberlanjutan program.

1. Upaya Adaptasi yang Dilakukan di *Gampong Uteunkot*

Implementasi adaptasi dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong Uteunkot* dilaksanakan melalui empat kegiatan utama, yaitu ketahanan pangan, penyediaan jalur evakuasi bencana, pengendalian banjir, dan pengendalian penyakit. Keempat kegiatan tersebut merupakan bentuk penyesuaian masyarakat terhadap risiko perubahan iklim yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah *Gampong Uteunkot*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Kelompok Tani Dara Manis, dan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan menjadi bentuk adaptasi yang paling berkembang. Pemanfaatan pekarangan rumah dan kebun desa melalui Kelompok Tani Dara Manis telah mendukung penyediaan pangan sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun demikian, keberlanjutan kegiatan masih dipengaruhi oleh pendampingan, ketersediaan sarana, dan tingkat partisipasi masyarakat sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh rumah tangga.

Pada aspek kesiapsiagaan bencana, pemerintah *Gampong* telah menyediakan plang jalur evakuasi sebagai sarana informasi ketika terjadi keadaan darurat. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, tetapi efektivitasnya masih memerlukan sosialisasi dan simulasi evakuasi secara berkala agar masyarakat memahami fungsi dan prosedur penggunaannya. Adaptasi juga dilakukan melalui pengendalian banjir dan pengendalian penyakit sebagai respons terhadap kondisi *Gampong Uteunkot* yang rawan genangan pada musim hujan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembersihan lingkungan, pemeliharaan drainase, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan pengendalian banjir belum mampu menekan risiko secara optimal. Sementara itu, pengendalian penyakit masih cenderung bersifat responsif sehingga memerlukan penguatan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan adaptasi dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, dan kondisi lingkungan. Pemerintah *Gampong*, Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok Tani Dara Manis, dan masyarakat telah menjalankan perannya masing-masing, namun efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, belum meratanya partisipasi masyarakat, serta kerentanan wilayah terhadap banjir. Implementasi adaptasi ProKlim di *Gampong Uteunkot* telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Namun, agar manfaatnya lebih berkelanjutan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya yang memadai sehingga kegiatan adaptasi dapat berlangsung secara konsisten dan berkesinambungan.

2. Upaya Mitigasi yang Dilakukan di *Gampong Uteunkot*

Upaya mitigasi dalam Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong Uteunkot* dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Kegiatan ini bertujuan mengurangi timbunan sampah organik yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan

pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai pupuk untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Pemerintah *Gampong* Uteunkot, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Kelompok Tani Dara Manis, dan masyarakat sebagai pelaksana di tingkat *Gampong*.

Pelaksanaan mitigasi dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos yang kemudian dimanfaatkan pada lahan pertanian dan pekarangan. Kegiatan ini memberikan manfaat lingkungan berupa berkurangnya penumpukan sampah organik serta mendorong pemanfaatan kembali limbah rumah tangga. Selain itu, penggunaan pupuk kompos membantu mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan mendukung kegiatan ketahanan pangan yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Dara Manis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi telah berjalan, namun pelaksanaannya belum berlangsung secara optimal. Pengelolaan kompos masih dilakukan oleh kelompok dan masyarakat tertentu sehingga belum berkembang menjadi kebiasaan yang diterapkan secara luas oleh seluruh rumah tangga. Keterbatasan sarana, anggaran, serta belum meratanya partisipasi masyarakat menyebabkan kegiatan pengelolaan sampah organik belum mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap pengurangan emisi maupun pengelolaan lingkungan di tingkat *Gampong*.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas mitigasi dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, dukungan antarorganisasi, dan karakteristik pelaksana. Dinas Lingkungan Hidup berperan melalui pembinaan dan pendampingan, pemerintah *Gampong* memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, sedangkan Kelompok Tani Dara Manis bersama masyarakat menjadi pelaksana utama di lapangan. Meskipun kolaborasi tersebut telah mendukung pelaksanaan program, keberlanjutan mitigasi masih memerlukan penguatan kapasitas masyarakat, penyediaan sarana pendukung, serta perluasan partisipasi agar pengelolaan sampah organik dapat berkembang sebagai praktik yang berkelanjutan dalam implementasi ProKlim di *Gampong* Uteunkot.

3. Aspek Pendukung Keberlanjutan Program Kampung Iklim

Keberlanjutan Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong* Uteunkot didukung oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran berbeda dalam pelaksanaan program. Dukungan tersebut berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe sebagai pembina, Pemerintah *Gampong* Uteunkot sebagai pengelola di tingkat lokal, Kelompok Tani Dara Manis sebagai pelaksana kegiatan masyarakat, serta akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Tani Dara Manis merupakan unsur yang paling berperan dalam mendukung keberlanjutan ProKlim. Kelompok ini menjadi wadah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan kebun desa. Keberadaan kelompok tersebut tidak hanya mendukung pelaksanaan kegiatan adaptasi, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat melalui pengelolaan kegiatan secara bersama-sama. Dengan adanya organisasi masyarakat yang aktif, pelaksanaan ProKlim tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah *Gampong*.

Selain itu, Pemerintah *Gampong* Uteunkot berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program di tingkat lokal, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe memberikan

pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi dalam pelaksanaan ProKlim. Akademisi dan LSM turut memberikan penyuluhan serta penguatan kapasitas masyarakat mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa implementasi ProKlim dilaksanakan melalui kerja sama berbagai aktor sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan program masih menghadapi beberapa kendala. Koordinasi antaraktor belum dilakukan secara rutin, pelaksanaan kegiatan masih bergantung pada beberapa anggota yang aktif, serta dukungan sumber daya belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian kegiatan mengalami penurunan setelah pembinaan atau penilaian ProKlim selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kelembagaan secara formal belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas organisasi yang mampu menjaga keberlangsungan program secara mandiri.

Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan ProKlim dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana, hubungan antarorganisasi, dan ketersediaan sumber daya. Hubungan yang telah terbangun antara Pemerintah *Gampong*, Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok Tani Dara Manis, akademisi, dan LSM mendukung pelaksanaan program. Namun, koordinasi yang belum berkesinambungan serta keterbatasan sumber daya menyebabkan implementasi belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan memerlukan kelembagaan yang kuat, koordinasi yang berkelanjutan, dan dukungan sumber daya yang memadai. Aspek pendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim di *Gampong Uteunkot* telah terbentuk melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dan keberadaan Kelompok Tani Dara Manis sebagai penggerak kegiatan masyarakat. Keberlanjutan program masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan sumber daya agar kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Implementasi Program Kampung Iklim di *Gampong Uteunkot*

Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong Uteunkot* Kota Lhokseumawe tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi ProKlim tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kegiatan lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya, koordinasi antaraktor, serta kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Pelaksanaan ProKlim membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, kapasitas sumber daya manusia, sarana pendukung, maupun komitmen kelembagaan. Keterbatasan pada aspek tersebut menyebabkan beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Program yang pada awalnya berjalan aktif cenderung mengalami penurunan intensitas ketika dukungan eksternal berkurang.

1. Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi pemerintahan *Gampong* menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong Uteunkot*. Pergantian aparatur menyebabkan proses penyesuaian kembali terhadap pelaksanaan program karena pemahaman mengenai tujuan, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan ProKlim belum terdokumentasi dengan

baik. Akibatnya, keberlanjutan program masih bergantung pada individu yang sebelumnya terlibat sehingga sebagian kegiatan mengalami perlambatan ketika terjadi pergantian aparatur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ProKlim belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem pemerintahan *Gampong*. Pengetahuan dan pengalaman pelaksanaan program masih tersimpan pada individu, bukan dalam bentuk dokumentasi, mekanisme serah terima, maupun prosedur kerja yang dapat diteruskan kepada aparatur berikutnya. Akibatnya, proses pembinaan dan penyesuaian perlu dilakukan kembali setiap terjadi pergantian kepemimpinan.

Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan disposisi pelaksana. Belum kuatnya sistem kelembagaan menyebabkan implementasi ProKlim masih bergantung pada individu, sehingga keberlanjutan program belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi program, mekanisme serah terima, serta integrasi ProKlim ke dalam tata kelola pemerintahan *Gampong* diperlukan agar keberlanjutan program dapat terjaga secara berkelanjutan.

2. Transisi Pemerintahan dan Lemahnya Memori Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi pemerintahan *Gampong* menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong* Uteunkot. Pergantian aparatur menyebabkan proses penyesuaian kembali terhadap pelaksanaan program karena pemahaman mengenai tujuan, pembagian peran, dan mekanisme pelaksanaan ProKlim belum terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, keberlanjutan program masih bergantung pada individu yang sebelumnya terlibat sehingga sebagian kegiatan mengalami perlambatan ketika terjadi pergantian aparatur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ProKlim belum sepenuhnya terlembagakan dalam sistem pemerintahan *Gampong*. Pengetahuan dan pengalaman pelaksanaan program masih tersimpan pada individu, bukan dalam bentuk dokumentasi, mekanisme serah terima, maupun prosedur kerja yang dapat diteruskan kepada aparatur berikutnya. Akibatnya, proses pembinaan dan penyesuaian perlu dilakukan kembali setiap terjadi pergantian kepemimpinan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan disposisi pelaksana. Belum kuatnya sistem kelembagaan menyebabkan implementasi ProKlim masih bergantung pada individu, sehingga keberlanjutan program belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi program, mekanisme serah terima, serta integrasi ProKlim ke dalam tata kelola pemerintahan *Gampong* diperlukan agar keberlanjutan program dapat terjaga secara berkelanjutan.

3. Koordinasi dan Monitoring yang Belum Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan monitoring dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong* Uteunkot belum berjalan secara berkelanjutan. Pada tahap awal, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, pemerintah *Gampong*, Kelompok Tani Dara Manis, dan masyarakat berlangsung melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta persiapan penilaian ProKlim. Namun, setelah program berjalan, intensitas komunikasi, pendampingan, dan pemantauan kegiatan cenderung menurun sehingga perkembangan program tidak selalu terpantau secara rutin.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi berjalan berdasarkan inisiatif masing-masing pihak tanpa didukung mekanisme koordinasi dan monitoring yang terjadwal. Akibatnya, berbagai kendala di lapangan tidak segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, sehingga keberlanjutan kegiatan menjadi kurang optimal. Monitoring juga masih bersifat insidental dan lebih banyak dilakukan pada saat pembinaan atau penilaian program, bukan sebagai bagian dari sistem pengendalian yang berkesinambungan.

Dalam perspektif Van Meter dan Van Horn, temuan tersebut berkaitan dengan variabel hubungan antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan (*inter-organizational communication and enforcement activities*). Implementasi kebijakan memerlukan koordinasi, komunikasi, dan monitoring yang dilakukan secara konsisten agar setiap aktor dapat menjalankan perannya secara efektif. Oleh karena itu, implementasi ProKlim memerlukan mekanisme koordinasi rutin, monitoring berkala, serta evaluasi yang berkelanjutan agar kegiatan adaptasi dan mitigasi tetap berjalan secara konsisten dan tidak hanya aktif pada saat pembinaan atau penilaian program.

4. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan yang Rawan Banjir

Kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di *Gampong* Uteunkot menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim). Hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir yang terjadi secara berulang, termasuk banjir besar pada 23 November 2025, tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kondisi ekonomi rumah tangga, serta memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan program. Dalam situasi tersebut, pemerintah *Gampong* dan masyarakat lebih memprioritaskan penanganan dampak banjir dibandingkan pelaksanaan kegiatan ProKlim yang bersifat jangka panjang. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian sumber daya pemerintah *Gampong* dialihkan untuk kegiatan tanggap darurat dan pemulihan, seperti penanganan warga terdampak, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan lingkungan. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak banjir lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan mata pencaharian sehingga partisipasi dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi mengalami penurunan. Akibatnya, beberapa kegiatan ProKlim tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam program. Tekanan ekonomi pascabanjir menyebabkan waktu, tenaga, dan sumber daya masyarakat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga daripada mengikuti kegiatan lingkungan. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi masyarakat pascabanjir tidak sepenuhnya menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, tetapi merupakan konsekuensi dari kondisi sosial ekonomi yang dihadapi.

Berdasarkan perspektif Van Meter dan Van Horn, temuan tersebut berkaitan dengan variabel kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang rawan banjir serta tekanan ekonomi masyarakat memengaruhi kapasitas pemerintah *Gampong* dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ProKlim secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi ProKlim tidak dapat dipisahkan dari karakteristik lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi ProKlim di *Gampong* Uteunkot perlu diintegrasikan dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui penguatan ketahanan pangan, pemeliharaan drainase, pengelolaan sampah, dan kegiatan adaptasi lainnya. Dengan pendekatan tersebut, ProKlim tidak hanya

berfungsi sebagai program lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim..

KESIMPULAN

Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di *Gampong Uteunkot* Kota Lhokseumawe telah menunjukkan adanya upaya pengendalian perubahan iklim melalui kegiatan adaptasi, mitigasi, dan dukungan kelembagaan masyarakat. Program telah mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena kegiatan belum berjalan secara konsisten, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan *Gampong*.

Hambatan implementasi dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya keberlanjutan kelembagaan akibat transisi pemerintahan, koordinasi dan monitoring yang belum berjalan secara berkesinambungan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang rawan banjir. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan, tetapi juga oleh sinergi antaraktor, kecukupan sumber daya, dan penguatan kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Khadatuz, W., Nurcahyaningtyas, I., Abellita, I., Virdiansyah, E., & Reviandani, O. (2021). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, Vol.1, No.(1).
- Alam, S., Mandra, M. A. S., Andika, Asrul, Pakambanan, A., & Hardiansyah, B. A. (2022). Sosialisasi Penerapan Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan Program Kampung Iklim di Desa Laikang untuk Mendukung Program (Sustainable Development Goals) SDGs Desa. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 867–873. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.3467>
- BPS. (2025). Statistic Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia 2025. In *Statistik Indonesia 2025*.
- Mandala, E., Setyadiharja, R., Siam, N. U., Firdaus, Z., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, S., & Dan, S. (2025). *Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang*. 6, 204–214.
- Mandasari, P., Ferizaldi, Aisyah, T., Hasyem, M., & Maryam. (2025). Collaborative Governance in Environmental Management for Climate Change Mitigation in Rayeuk Kareung Village, North Aceh. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 5(2), 43–48.
- Mangiri, D. W. (2023). *Implementasi Program Kampung Iklim (Proklm) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purworejo Kabupaten Lumajang*. Universitas Airlangga.
- Maranda, H. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. *Research Gate*, April, 12–40.
- Mukhyi, M. A. (2023). *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mursidah, Syawandy, A., Pusparini, R., Faizal, M., Nabil, G., Amalia, N. P., Rio, M. Y., Kurniawan, D. R., Novriandi, F., Ari, D., Eko, P., & Suprianto, A. (2025). Implementasi Konsep Eco-Future dalam Keberlanjutan Program Kampung Iklim di Kelurahan Kampung Baru Kabupaten Penajam Paser Utara

- Universitas Mulawarman Perubahan iklim merupakan suatu kondisi dimana berubahnya temperatur atau suhu yang ada di bumi dalam j. *Jurnal Abdimas Lamin*, 3(2), 131–143.
- Nurlukman, A. D., & Basit, A. (2023). Implementasi Smart Environment City Dalam Tata Kelola Lingkungan Di Kota Tangerang. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 769–784.
- Pramono Sos, J. S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Riani, A., Suwitri, S., & Kurniasih, Y. (2024). Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 28–40. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8620>
- RPPLH Lhokseumawe. (2022). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPLH) Kota Lhokseumawe 2022-2051. In *Pemerintah Kota Lhokseumawe Badan Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe* (Vol. 33, Issue 1).
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238–251. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>
- Serambi News. (2024). *Anggota DPRA Desak Pemerintah Serius Atasi Banjir Tahunan di Lhokseumawe*. Serambi News.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung. Alfabeta.
- Susant, A. A., Antika, A. A., Pratama, R., Pradana, F. G., Handayani, S., & Sutaryono. (2022). Implementasi dan Pengembangan Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) di Desa Kertonatan. *Buletin KKNPendidikan*, 4(1), 58–68. <https://doi.org/doi: 10.23917/bkkndik.v4i1.19183>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (pp. 2–55). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yazan, B. (2015). *Three Approaches to Case Study Methods in Education : Yin , Merriam , and Stake Three Approaches to Case Study Methods in Education : Yin , Merriam , and Stake*. 20(2), 134–152.